

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah menjadi salah satu bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan dilakukan tidak hanya fokus di tingkat nasional tetapi juga dilakukan pada tingkat yang lebih kecil, yaitu daerah provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa. Seringkali pembangunan di wilayah yang lebih kecil mampu memberikan hasil yang mendukung pembangunan di wilayah yang lebih besar. Pada tingkat yang lebih kecil, pembangunan dilakukan di tingkat daerah setingkat provinsi maupun setingkat kabupaten atau kota.

Keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu negara berkembang dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan kesempatan kerja. Pendekatan pertumbuhan ekonomi banyak dilakukan di berbagai daerah untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup suatu negara yang sering kali diukur dengan tinggi rendahnya penyerapan perkapita. Jika perekonomian suatu daerah tinggi, maka akan tercipta pasar tenaga kerja yang tinggi pula.²

² Fivien Muslihatinningsih, et. All, "Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Timur", *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol. VII No. 1, 2020, hlm. 1

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu penopang kekuatan ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi Provinsi Jawa Timur menyumbang hampir 15 persen produk domestik bruto nasional, nomor dua setelah DKI Jakarta. Provinsi ini adalah salah satu dari delapan Provinsi paling awal di Indonesia selain Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Provinsi ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 tahun 1950. Dasar hukum pembentukan ini kemudian diubah dengan UU 18/1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur. Hari jadinya ditetapkan pada 12 Oktober berdasarkan peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007. Ibukotanya terletak di Surabaya. Populasi penduduk Jawa Timur merupakan nomor dua terbesar setelah Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 41,14 juta jiwa pada tahun 2022.

Jawa Timur telah memiliki jumlah penduduk atau jumlah angkatan kerja yang sangat tinggi. Bertambahnya jumlah penduduk akan mempengaruhi tumbuh kembangnya jumlah angkatan kerja. Semakin banyak jumlah penduduk usia kerja maka juga akan menambah jumlah angkatan kerja. Maka dari itu, akan semakin banyaknya orang yang akan mencari pekerjaan dan kemungkinan juga banyak yang masih menganggur. Dengan demikian, saat ini diperlukannya adanya pembangunan ekonomi untuk memperkecil jumlah pengangguran. Dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu wilayah dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan yaitu peningkatan di semua sektor. Saat ini ketenagakerjaan masih menjadi salah satu masalah yang belum bisa diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah

penduduk dan angkatan kerja yang terus meningkat akan tetapi tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Maka dari itu, diperlukannya penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup supaya dapat mengimbangi jumlah pertumbuhan penduduk. Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial dan ekonomi. Salah satu tujuan penting dalam pembangunan ekonomi adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mengejar pertumbuhan angkatan kerja yang pertumbuhannya lebih cepat dari pertumbuhan kesempatan kerja.

Di Jawa Timur sendiri jumlah tenaga kerja mengalami kenaikan pada periode tahun 2018 sampai dengan 2022 secara terus menerus, akan tetapi di tahun 2020 justru mengalami penurunan. Penyebab menurunnya jumlah tenaga kerja yang terjadi pada tahun 2020 adalah dikarenakan adanya *virus Corona* atau *covid-19* yang akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang terpaksa mengurangi jumlah karyawannya. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur periode 2018-2022 sebagai berikut ini:

Tabel 1.1 Persentase tenaga kerja di Jawa Timur 2018-2022

No	Tahun	Jumlah
1	2018	20,832,201
2	2019	21,032,612
3	2020	20,962,967
4	2021	22,180,011
5	2022	22,869,012

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 2023 (data diolah)

Jika diamati selama periode 2018 sampai dengan periode 2022 jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan, yang mana pada tahun 2018 jumlahnya

hanya 20.832.201 orang dan terus meningkat setiap tahunnya yang pada akhirnya berjumlah 21.032.612 orang di tahun 2019. Akan tetapi jumlah tenaga kerja di Jawa Timur pada tahun 2020 sedikit mengalami penurunan, yang awalnya di tahun 2019 berjumlah 21.032.612 orang turun menjadi 20.962.967 orang di tahun 2020 dan kembali naik menjadi 22.180.011 sampai 22.869.012 pada tahun 2021 dan 2022. Dari perkembangan jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jawa Timur yang cenderung mengalami kenaikan tersebut, menjadikan minat bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan faktor apa saja yang dapat memberikan pengaruh pada tingkat penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur. Sehingga kemudian akan diperoleh faktor apa saja yang seharusnya ditindaklanjuti agar dapat membantu mengatasi permasalahan tenaga kerja tersebut.

Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pemerintah setiap negara tidak terkecuali Indonesia terkhusus Provinsi Jawa Timur juga melakukan reformasi terkait permasalahan tenaga kerja. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang ada agar masalah pengangguran dapat berkurang.³

Menurut Handoko, penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut yaitu tingkat PDRB, tingkat inflasi, pengangguran, IDM dan tingkat bunga. Sedangkan

³ *Ibid*, hlm. 32

faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, kepuasan kerja, modal, dan pengeluaran non upah.⁴

Pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya angka penyerapan tenaga kerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IDM), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah penulis tentukan ada 13 kabupaten/kota yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini berada di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri. Adapun wilayah kerja Bank Indonesia Kpw Kediri meliputi kabupaten Kediri, kota Kediri, Nanjuk, Blitar, kota Blitar, Madiun, kota Madiun, Tulungagung, Ponorogo, Ngawi, Magetan, Pacitan, dan Trenggalek.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tenaga kerja di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Data tingkat pengangguran tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.2 Persentase tenaga kerja di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri 2018-2022

Tahun	Jumlah
2018	854.801
2019	885.676
2020	91.441
2021	99.762
2022	112.502

Sumber: Data BPS Diolah

⁴ Andi Wijaya, et. all, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Riau", *Jurnal Jom FEKON*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 6

Dari tabel 1.2 menyatakan bahwa tenaga kerja wilayah kerja Bank Indonesia Kediri mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini berarti ada beberapa kemungkinan kenaikan tenaga kerja memengaruhi semakin tingginya tingkat pengangguran yang terjadi.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah indeks pembangunan manusia. Dalam teori *human capital* dijelaskan bahwa penting meningkatkan indeks pembangunan manusia dengan peningkatan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi maka produktivitas penduduk akan meningkat. Dengan demikian, maka penyerapan tenaga kerja di daerah tersebut akan semakin meningkat. Sementara itu, upaya dalam pengukuran indeks pembangunan manusia dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, salah satunya dengan melihat kesehatan, pengetahuan atau pendidikan, dan standar hidup layak.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), indeks pembangunan manusia di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 1.3 Persentase Indeks Pembangunan Manusia di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri 2018-2022

Tahun	Jumlah
2018	72,26
2019	72,92
2020	73,09
2021	73,4
2022	74,23

Sumber: Data BPS Diolah

Dari tabel 1.3 menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini berarti ada beberapa kemungkinan kenaikan indeks pembangunan manusia akan memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah faktor tingkat upah. Menurut Asyhadie, upah minimum merupakan upah terendah yang dijadikan standar oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja yang bekerja di perusahaannya. Para pendukung upah minimum yang lebih tinggi memandang sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan para pekerja miskin. Meskipun para pendukung upah minimum mengakui kebijakan itu menyebabkan pengangguran bagi sebagian pekerja, namun mereka berpendapat bahwa pengorbanan ini setimpal untuk mengentaskan kemiskinan kelompok masyarakat lain.⁵

Menurut Simanjuntak, salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah ketenagakerjaan adalah dengan memperbaiki sistem upah melalui kebijakan upah minimum. Penerapan kebijakan upah minimum merupakan usaha untuk meningkatkan upah pekerja sehingga tingkat upah rata-rata tenaga kerja dapat meningkat. Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang telah sering kali diterapkan diberbagai negara yang pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama, upah minimum adalah alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan supaya nilai upah yang

⁵ Andi Nurahman Ramdani, et. al, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Tengah 2014-2019", *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (JEBA)*, Vol. 23 No. 2, 2021, hlm. 21

diterima tidak menurun dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sisi kedua, sebagai alat proteksi bagi perusahaan untuk mempertahankan produktivitas pekerja.⁶ Berikut ini adalah data perkembangan Upah Minimum Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri, pada periode tahun 2018-2022:

Tabel 1.4 Persentase Upah Minimum Kerja di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri 2018-2022

Tahun	Jumlah
2018	1.758.117
2019	1.899.294
2020	1.954.705
2021	1.991.105
2022	2.182.501

Sumber: Data BPS Diolah

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri setiap tahunnya terus mengalami kenaikan, walaupun besarnya berbeda-beda. Peningkatan jumlah UMK dapat dilihat dari meningkatnya jumlah besaran yang awalnya di tahun 2018 sebesar Rp. 1.758.117 naik secara terus menerus hingga pada akhirnya di tahun 2022 menjadi Rp. 2.182.501.

Selain Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), faktor kedua yang juga mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut Feriyanto, PDRB merupakan nilai tambah atas barang dan

⁶ Desy Meilasari, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Pulau Jawa Tahun 2010-2016", *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 170

jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi atau sektor di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Meningkatnya output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerjanya supaya produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan yang terjadi.⁷ Atau dengan kata lain dinyatakan adanya peningkatan PDRB akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, terdapat hubungan positif antara PDRB dengan penyerapan tenaga kerja.

Dalam ukuran makro ekonomi, tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara pada umumnya diukur menggunakan GDP perkapita. Kenaikan GDP perkapita mengindikasikan peningkatan tingkat kesejahteraan penduduk suatu negara. Walaupun ukuran ini memiliki banyak kekurangan akan tetapi dalam prakteknya ukuran tersebut memiliki arti penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan. GDP atau *Gross Domestic Product* (pendapatan domestik bruto-PDB) diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam jangka waktu satu tahun dan dalam nilai mata uang domestik atau internasional.⁸

Keberhasilan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang, dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan

⁷ *Ibid*, hlm. 171

⁸ Chandra Utama, "Kesejahteraan Penduduk Antar Negara Diukur menggunakan GDP Perkapita dan GDP-PPP Perkapita", *Bina Ekonomi Majalah Ilmiah Fakultas Ekonomi*, Vol. 17 No. 1, 2019, hlm. 2

kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan ekonomi disini merupakan serangkaian cara atau usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sering kali diukur dengan menggunakan pendapatan perkapita. Menurut Sukirno, pertumbuhan ekonomi merupakan serangkaian cara suatu wilayah dalam hal perekonomian untuk menggerakkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur akan lebih banyak tersedia, perusahaan semakin berkembang maju dan bertambah, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin canggih, kesempatan kerja akan bertambah, tingkat penyerapan tenaga kerja meningkat, dan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.⁹

Berikut ini adalah data PDRB Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri, pada periode tahun 2018-2022:

Tabel 1.5 Persentase Pertumbuhan ekonomi wilayah kerja bank Indonesia Kediri, Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Pertumbuhan Ekonomi
2018	5,50
2019	5,52
2020	-2,33
2021	3,57
2022	5,34

Sumber : BPS Jawa Timur

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri mengalami fluktuatif setiap tahunnya, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50%, tahun

⁹ Budi Suryono, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur*, (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm. 1

2019 mengalami kenaikan sebesar 2% menjadi 5,52%. Ditahun 2020 pandemi covid-19 pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bank Indonesia Kediri menurun menjadi -2,33%. Sedangkn pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 3,54 % dan 5,34%.

Selanjutnya faktor lain yang juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu investasi. Investasi merupakan pengeluaran pemerintah dan non pemerintah (swasta), dimana membutuhkan modal riil untuk mendirikan perusahaan baru dengan hasil keuntungan mereka dan dapat memperluas usaha yang telah ada. Sehingga dampak positifnya adalah dapat memberikan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peluang kerja bagi masyarakat. Selain itu, juga dapat memperoleh keuntungan lebih besar dari modal awal dengan menginvestasikan modalnya tersebut. Investasi khususnya pada investasi yang berorientasikan pada padat karya sehingga dapat memperluas lapangan kerja, dari pada industri padat modal yang hanya menambah modal secara terus menerus tetapi tidak berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja.¹⁰

Investasi pada sektor riil disini merupakan bentuk investasi yang dapat dikatakan sebagai investasi jangka panjang. Dalam hal ini dikarenakan perkembangan investasi di sektor riil relative memakan waktu yang cukup lama. Saat ini pertumbuhan ekonomi diharapkan dari tingginya konsumsi masyarakat dapat dijadikan laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, konsumsi masyarakat tidak akan mungkin naik tanpa adanya peningkatan pendapatan di

¹⁰ Desy Meilasari, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB, dan Investasi ...", hlm. 171

sektor riil tempat dimana masyarakat bekerja dan memperoleh pendapatan. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan di sektor riil diperlukannya investasi, baik dalam perluasan maupun investasi baru, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan menciptakan produk baru sebagai antisipasi perubahan permintaan pasar. Peningkatan kapasitas produksi ini berarti sama saja dengan adanya penyerapan tenaga kerja baru dan meningkatkan pendapatan pekerja yang lainnya yang pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Maka dari itu, sudah jelas bahwa pertumbuhan pada sektor riil memainkan peranan yang sangat penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan di sektor riil tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pertumbuhan di sektor riil membutuhkan investasi untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi suatu negara tersebut. Investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan kontribusi yang diberikannya. Kontribusi investasi ini bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan, peningkatan investasi akan menstimulasikan pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan permintaan yang efektif. Sedangkan berdasarkan dari sisi penawaran, peningkatan investasi merangsang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lebih banyak cadangan modal yang kemudian berkembang dalam bentuk peningkatan kapasitas produksi.¹¹

¹¹ Irma Mar'atus Sholihah, et. all., "Analisis Investasi Sektor Industri Manufaktur, Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia", *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 12 No. 1, 2019, hlm. 12

Berikut ini adalah data investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri, pada periode tahun 2018-2022:

Tabel 1.6 Persentase investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri)wilayah kerja bank Indonesia Kediri, Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah
2018	27,607,439.00
2019	35,899,932.00
2020	41,252,370.00
2021	48,342,900.00
2022	53,781,430.00

Sumber : BPS Jawa Timur

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa nilai investasi PMDN di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri, pada periode tahun 2018-2022 selalu mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Tercatat di tahun 2018 hanya berjumlah Rp. 27,607,439.00, ditahun 2019 bertambah kisaran hingga 5 jutaan rupiah. Dan hampir setiap tahunnya bertambah ditahun 2020 bertambah 6 juta, tahun 2021 hanya bertambah 7 jutaan saja. Dan pada akhirnya di tahun 2022 mencapai Rp. 53,781,430.00.

Selanjutnya untuk faktor kelima selain faktor di atas, yang juga dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sering disebut dengan APBD. Dalam mengejar keberhasilan pembangunan daerah harus disertai dengan penciptaan lapangan kerja baru. Bukan sekedar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi pertumbuhan kuantitas dan kualitas lapangan kerja melalui usaha ekonomi padat pekerja. Menurut Simanjuntak, investasi pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter harus mempertimbangkan dan memberi prioritas pada sektor ekonomi

(*business*) yang berpotensi, misalkan pada sektor pertanian, manufaktur, makanan, dan sector jasa. Penyerahan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah disertai dengan kewenangan pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah harus mempunyai sumber-sumber penerimaan sendiri untuk membiayai pengeluaran.¹²

Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Beberapa rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan yang bersumber dari APBD yaitu: 1) rasio kemandirian untuk menilai tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan ekonomi daerah, 2) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan asli daerah, 3) rasio efesiensi untuk mengukur efesiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah dan rasio keserasian.¹³ Berikut ini adalah data APBD Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri, pada periode tahun 2018-2022:

Tabel 1.7 Persentase APBD wilayah kerja bank Indonesia Kediri, Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah
2018	47.930.345.048.249
2019	55.637.622.963.545
2020	55.166.696.358.671
2021	5.734.982.655.100
2022	5.887.985.213.431

¹² Laily Chodariyanti, "Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Lamongan", *Jurnal Media Mahardhika*, Vol. 17 No. 1, 2018, hlm. 71

¹³ *Ibid.*, hlm. 71

Sumber : BPS Jawa Timur

Dari data di atas dapat dilihat bahwa nilai APBD wilayah kerja bank Indonesia Kediri pada tahun 2018-2022 selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya secara terus menerus. Akan tetapi di tahun 2020 justru mengalami penurunan akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar dari tahun 2019 yang awalnya mencapai nilai 55.637.622.963.545 turun menjadi 55.166.696.358.671 ditahun 2020.

Alasan dilakukan penelitian di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri, adalah karena wilayah mataraman Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu pusat perekonomian di pulau Jawa dan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi cukup baik. Wilayah mataraman Provinsi Jawa Timur jugu mulai muncul dan berkembangnya perusahaan sektor industry. perusahaan yang cukup berperan dalam proses penyerapan tenaga kerja khususnya pada sektor industri. Dimana semakin banyak jumlah perusahaan manufaktur maka semakin banyak pula jumlah penyerapan tenaga kerja dalam proses industri. Dan selanjutnya nilai produksi juga menjadi faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja. Jumlah produksi merupakan jumlah keseluruhan dari hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan industri. Semakin tinggi jumlah produktivitas, maka tenaga kerjanya juga semakin tinggi dan jumlah produksinya semakin bertambah, begitupun sebaliknya. Serta jumlah upah yang diberikan jika terus meningkat, secara tidak langsung akan berdampak signifikan terhadap penawaran tenaga kerja. Karena dengan adanya peningkatan upah yang diberikan oleh

perusahaan tersebut, maka para pengusaha akan berupaya untuk meningkatkan pula jumlah unit usahanya sehingga dengan adanya penambahan unit tersebut pengusaha secara otomatis akan menambah pula jumlah tenaga kerjanya.¹⁴

Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang telah dipaparkan di atas, mengenai data IDM, UMK dan Investasi PMDN yang selalu mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun ke tahun, data PDRB dan APBD yang mengalami naik turun disetiap tahunnya, serta pembahasan mengenai pengaruh yang diberikan oleh IDM, UMK, PDRB, Investasi, dan APBD terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri menjadi alasan dari peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti kemudian mengusung judul pada penelitian ini dengan berjudulkan “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan beberapa masalah, antara lain:

1. Indeks pembangunan manusia di tipa Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri mengalami kenaikan

¹⁴ Novi Rosyana dan Aris Soelistyo, “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Manufaktur Besar dan Sedang Pada Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur (2017-2019)”, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 4 No. 4, 2020, hlm. 2

di setiap tahunnya walaupun besarnya di setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda.

2. Besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri mengalami kenaikan di setiap tahunnya walaupun besarnya di setiap Kabupaten/Kota berbeda-beda.
3. Laju pertumbuhan PDRB di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri mengalami naik turun, bahkan ditahun 2020 semua Kabupaten/Kota mengalami penurunan. Selain itu juga wilayah yang selama periode tahun 2018-2022 tetap terus mengalami kenaikan laju pertumbuhan PDRB walaupun tidak terlalu banyak.
4. Besaran jumlah Investasi di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Peningkatan investasi akan membuka atau memperluas kesempatan kerja, sehingga akan menyerap sumber daya manusia yang lebih banyak.
5. APBD di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri mengalami naik turun, empat tahun terakhir mengalami kenaikan secara terus menerus akan tetapi di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Hal tersebut juga terjadi pada Kabupaten/Kota yang berada di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri dimana rata-rata mengalami naik turun setiap tahunnya
6. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten/Kota wilayah kerja bank Indonesia Kediri mengalami naik turun di setiap tahunnya. Rata-rata dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan akan tetapi di tahun 2020

mengalami penurunan, hal ini akan mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari pemaparan latar belakang yang diuraikan tersebut maka rumusan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022?
2. Apakah upah minimum kerja berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022?
3. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022?
4. Apakah investasi berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022?
5. Apakah anggaran pendapatan dan belanja daerah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022?
6. Apakah indeks pembangunan manusia, upah minimum kerja, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap

penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji indeks pembangunan manusia terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022
2. Untuk menguji upah minimum kerja terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022
3. Untuk menguji pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022
4. Untuk menguji investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022
5. Untuk menguji anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022
6. Untuk menguji indeks pembangunan manusia, upah minimum kerja, pertumbuhan ekonomi, investasi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten/kota wilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan tentang indeks pembangunan manusia, upah minimum kerja, pertumbuhan ekonomi, investasi, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penyerapan tenaga kerja.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber acuan tambahan kajian dalam aspek ekonomi pembangunan dan ekonomi islam.

2. Secara Praktisi

a. Bagi Akademik

Mengembangkan materi pembelajaran tentang tingkat kemiskinan dan meningkatkan kredibilitas Univeritas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagun melalui penelitian ini.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi kepada pembaca dan bisa menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang dapat memudahkan peneiti dalam melakukan penekitiannya yang bertujuan agar penelitian bisa lebih efektif dan efisien dalam memisahkan aspek tertentu sebuah objek dan untuk menghindari pembahasan yang meluas dari tema studi ini. adapun variabel bebas meliputi indeks pembangunan manusia

(X_1), upah minimum kerja (X_2) investasi (X_3), dan anggaran pendapatan belanja daerah (X_3). Sedangkan variabel terikat adalah penyerapan tenaga kerja (Y).

2. Keterbatasan penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas dan tetap sesuai dengan judul skripsi diatas, maka penulis membatasi masalah penelitian, yaitu:

- a. Peneliti hanya terfokus pada indeks pembangunan manusia, upah minimum kerja, pertumbuhan ekonomi, investasi, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penyerapan tenaga kerja
- b. Untuk indeks pembangunan manusia, upah minimum kerja, pertumbuhan ekonomi, investasi, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penyerapan tenaga kerja diambil dari kabupaten/kotawilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022.
- c. Lokasi penelitian pada kabupaten/kotawilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022.
- d. Keterbatasan waktu penelitian, keterbatasan waktu dan fikiran peneliti sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kotawilayah kerja BI Kediri tahun 2018-2022.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual
 - a. Penyerapan Tenaga Kerja

Penyerapan tenaga kerja merupakan suatu jumlah kuantitas tertentu dari tenaga kerja yang digunakan oleh suatu sector atau unit usaha tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah riil dari tenaga kerja yang dikerjakan dalam suatu unit usaha.¹⁵

b. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah sebuah pengukuran yang digunakan dalam menilai pembangunan manusia di suatu negara dengan menggunakan kombinasi dari bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan.¹⁶

c. Upah Minimum Kerja

Upah adalah imbalan sebagai pihak pekerja atau buruh yang diterima dan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh dinyatakan dalam bentuk uang yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundangundangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.¹⁷

d. Pertumbuhan Ekonomi

¹⁵ Hambarsari dan Kunto Inggit, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur Tahun 2010-2019", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019

¹⁶ Sudono Sukirno, *Makro Ekonomi Moderen*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2000). hlm. 35

¹⁷ Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi, Pengaruh Jumlah Upah Minimum Kabupaten/Kota, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lebak, *jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, No. 1, 2016, hlm.206

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang terjadi dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang.¹⁸

e. Investasi

investasi adalah menanamkan uang sekarang, berarti uang tersebut yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan investasi, uang tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa depan. Dengan demikian, maka investasi dapat dirumuskan sebagai mengorbankan peluang konsumsi saat ini, untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Manajemen investasi makro bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Dalam hal ini dikelola adalah investasi secara nasional, baik dilakukan oleh swasta domestic dan asing, maupun dilakukan oleh publik atau negara, termasuk BUMN, BUMD, atau proyek investasi untuk sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat luas, maka lingkup manajemen investasinya juga luas meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan investasi public tersebut.¹⁹

f. APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8 yang dinyatakan bahwa:

¹⁸ Hambarsari dan Kunto Inggit, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 20010-2019", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019

¹⁹ Wahyu Hidayah, et. all., "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Samarinda", *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen*, Vol. 12 No. 1, 2016, hlm.141

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran, sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan perangkat daerah. Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran ini, kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan potensi kerja yang akan dicapai.²⁰

2. Secara Operasional

Definisi operasional adalah definisi terhadap suatu variabel yang memberikan arti atau menyampaikan suatu operasional yang digunakan untuk mengukur suatu variabel.²¹ Adapun tujuan dari definisi operasional ini adalah untuk mengetahui indikator-indikator disetiap variabel. Berikut adalah indikatornya:

- a. Tenaga Kerja, Penyerapan tenaga kerja dapat dilihat melalui beberapa indikator, meliputi: perencanaan tenaga kerja, penduduk dan tenaga kerja, kesempatan kerja, pelatihan kerja dan kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan

²⁰Yuliasati, “Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah”, *E Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No. 4, 2017, hlm. 161

²¹Iswi Hariani, *Restrukturisasi dan Penghimpunan Kredit Macet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 234

- kerja, pengupahan dan kesejahteraan pekerja, dan jaminan social tenaga kerja.
- b. Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.
 - c. Upah Minimum Kabupaten/Kota yang memiliki beberapa indikator, meliputi: tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, daya beli dan kebutuhan hidup pekerja, dan kemampuan perusahaan di setiap daerah.
 - d. Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat melalui kenaikan pendapatan nasional, pendapatan perkapita, tenaga kerja yang besar, dan berkurangnya tingkat kemiskinan.
 - e. Investasi saham memiliki dua indikator, yaitu: Lagging dan Leading. Lagging yaitu peninjauan harga saham masa lalu agar investor mengetahui pergerakan momentum harga sekarang. Sedangkan leading merupakan indeks prediksi pergerakan harga saham di masa yang akan mendatang. Setiknya mengetahui gambaran tentang indeks stock.
 - f. APBD memiliki beberapa indikator, meliputi: Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang tepat waktu, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan keuangan oleh BPK, dan perbaikan atas indeks persepsi korupsi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat untuk memudahkan pembaca dapat memahami alur dari penelitian yang disajikan sebagai berikut:

1. Bagian Awal Skripsi

Pada bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

2. Bagian Utama Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Secara garis besar pendahuluan berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab landasan teori ini mencakup tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Landasan teori ini juga memuat kerangka berpikir teoritis mengenai indeks pembangunan manusia, upah minimum kerja, pertumbuhan ekonomi, investasi, anggaran pendapatan dan belanja daerah serta penyerapan tenaga kerja, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tentang rancangan penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, populasi sampling dan sampel, sumber data dan variabel penelitian, teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian serta menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang paparan data dan pengujian hipotesis yang menjelaskan tentang temuan penelitian untuk masing-masing variabel dalam penelitian.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang analisis cara melakukan konfirmasi antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada serta jawaban dari rumusan masalah.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini menguraikan mengenai rangkuman dan menarik kesimpulan dari permasalahan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Pada penutup juga berisi mengenai saran-saran yang diberikan oleh peneliti kepada pihak yang terkait dalam penelitian ini.

3. Bagian Akhir Skripsi.

Pada bagian akhir dari skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.